

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Nilia Asnida, Irwansyah, Nila Aprila

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to examine empirically the Influence of Government Internal Control Systems (GICS), Regional Management Information Systems (RMIS), and Application of Government Accounting Standards (GAS) to the Quality of Financial Statements (QFS). This research was carried out at the regional government of Bengkulu Province, using a sample of 84 respondents. Data collection methods use surveys, while data analysis techniques used are validity and reliability testing, hypothesis testing is done using linear regression analysis.

The results of the study show (1) the application of GICS has a positive effect on the QFS. By continuously strengthening GICS, it will have an impact on improving the QFS. (2) The application of RMIS has a positive effect on the QFS. This shows that the better the implementation of the regional management information system, the more qualified local government financial reports will be. (3) GAS implementation has a positive effect on the QFS. This proves that the better the level of implementation of QFS that is carried out in the preparation of financial statements, it will have a positive impact on improving the QFS.

Keywords: Internal Control Systems, Information Systems, Government Accounting Standards and Financial Statement.

1. Pendahuluan

Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Kebutuhan akan akuntabilitas suatu laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang ada di Negara Indonesia yang telah menerapkan SPIP, Simda dan SAP dalam peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. dalam beberapa tahun terakhir terdapat penurunan kualitas laporan keuangan sehingga diperlukan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu..

Hasil pemeriksaan Pemberian Opini Oleh BPK telah dilakukan di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan, fenomena inimerupakan hal menarik untuk

dikaji lebih lanjut . Gambaran ini dapat dilihat dari opini yang diberikan BPK terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan berdasarkan hasil rekapitulasi opini BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu diperoleh data sebagai berikut:

Table 1. Opini BPK atas LKPD Provinsi Bengkulu

No.	Entitas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Provinsi Bengkulu	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
2	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Bengkulu tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
4	Kab. Seluma	WDP	WDP	TW	WDP	WDP
5	Kab. Kaur	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
6	Kab. Kepahiang	TMP	WDP	WDP	WTP	WDP
7	Kab. Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Bengkulu Utara	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
9	Kab. Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
10	Kab. Lebong	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP

Diperolehnya penurunan pemberian Opini dari BPK RI menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (a) Adanya kelemahan sistem pengendalian intern; (b) Belum tertatanya barang milik daerah dengan tertib; (c) Tidak sesuai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI ditemukannya fenomena yang terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu:

- Laporan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu sudah cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan daerah (SIMDA) sejak tahun 2014, tapi dalam pelaksanaan aplikasi SIMDA ini belum sepenuhnya digunakan secara optimal yang disebabkan oleh kemampuan penguasaan pengoperasian SIMDA yang belum merata di setiap OPD
- Adanya temuan realisasi belanja modal yang menunjukkan bahwa dari 29 paket pekerjaan terdapat 27 paket pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak, yang nilainya sangat material sehingga berdampak pada kewajaran penyajian belanja modal. Permasalahan ini umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan harus dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mencapai kondisi demikian, tentu saja tidak mudah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah peraturan yang ada, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern. Faktor-faktor tersebut selanjutnya menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 36 Ayat (1) menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan basis kas yang dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara, oleh karena itu diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menerangkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD. Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, transparansi dan evaluasi kinerja. Penerapan SAP oleh Pemerintah Daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (Zeyn, 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah mewajibkan pemanfaatan teknologi informasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Wilkinson et al (2000) teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Terkhusus untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut nantinya harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang (UU) No 17 tahun 2003 juga mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya.

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat dan menarik untuk dikaji dan ditelusuri lebih dalam, apalagi permasalahan mengenai buruknya kualitas laporan keuangan ini tidak hanya terjadi di lingkup Pemerintah Pusat saja tetapi sudah merambah ke berbagai sektor di Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalisasi manajemen daerah, saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA ialah (1) menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2) menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4) memperkuat basisi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Program implementasi SIMDA yang telah diimplementasikan meliputi implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan.

Dari berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan yang telah dijelaskan diatas, tentu ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan buruknya Sistem Pengendalian Internal (SPI), sehingga menyebabkan permasalahan kualitas laporan keuangan yang buruk di berbagai pemerintahan daerah terus terjadi dan berlanjut.

Sistem Pengendalian Internal (SIP) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang melekat pada fungsi manajerial ditujukan untuk memastikan dan menjamin bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik. Dalam implementasinya pengendalian internal pada hakekatnya adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan informasi serta laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donalson dan Davis (1997) teori Stewardship merupakan suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak jujur dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan organisasinya. Teori ini dapat digunakan untuk melihat perilaku pengelola keuangan daerah terkait motivasinya dalam bertindak untuk kepentingan pemilik pememrintah daerah yaitu masyarakat.

Teori stewardship didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku self serving dan pro-organisational, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi, dimana perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal tempat steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan self serving untuk berperilaku kooperatif, sehingga meskipun kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas yang lain (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2007:151).

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan data dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan (Bastian, 2007: 24). Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Suparman, Edy, & Wayan, 2014).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain:

- Relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa

masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- Andal. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.
- Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

The Rutteman Report (1994), mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai suatu keseluruhan sistem pengendalian, keuangan dan non keuangan, yang dibentuk dalam rangka menyediakan keyakinan yang layak mengenai: (a) efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; (b) pengendalian keuangan internal; dan (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan terhadap aset negara serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- Penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam
- Kegiatan Pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi
- Informasi dan Komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

2.4. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Indra. 2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan penerapan aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah:

- Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governement;
- Sebagai sarana untuk pelaksanaan good governement.

Manfaat dalam penggunaan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
- Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin);
- Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana: Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2.5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Bastian (2009:134) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selanjutnya, Bastian (2009:135) menjelaskan bahwa SAP memiliki kedudukan penting, di antaranya adalah : (1) SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah; dan (2) setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan juga adanya upaya pengharmonisan atas berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dilakukan dengan menerapkan pencatatan transaksi sesuai dengan siklus-siklus akuntansi atau siklus laporan keuangan. Berkaitan dengan hal

tersebut, Margono (2010) standar standar akuntansi pemerintahan meliputi siklus atau tahapan sebagai berikut:

- Proses transaksi. Proses transaksi meliputi hal-hal yang berkaitan langsung dengan transaksi yang akan dilaporkan, baik berupa transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran.
- Bukti transaksi. Dalam transaksi, keberadaan bukti transaksi sangat penting dalam mendukung pencatatan transaksi keuangan. Suatu transaksi keuangan jika diikuti dengan bukti yang kuat, akan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Jika transaksi yang terjadi adalah transaksi penerimaan, maka akan masuk ke buku kas penerimaan, sedangkan jika transaksi pengeluaran akan dicatat dalam buku kas pengeluaran.
- Pengelompokkan dan Pengikhtisaran transaksi. Pengelompokkan dan pengikhtisaran transaksi dilakukan dengan mengelompokkan transaksi sesuai dengan rumpun maupun turunan transaksi tersebut. Hal ini agar memudahkan untuk melakukan penelaahan dan menelusuri jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan transaksi.
- Pelaporan transaksi. Sistem Akuntansi pemerintahan pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan di tingkat Pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah antara lain PP tentang SAP. Dalam sistem akuntansi pemerintah antara lain akan diuraikan cara memproses data/bukti transaksi sampai dihasilkan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

3. Metode Penelitian

3.1. Metode Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel dengan kriteria tertentu. Sampel yang diambil adalah pegawai yang bertugas di bagian akuntansi/Keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang memiliki tanggungjawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kriteria sebagai berikut:

- Status pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Tingkat Pendidikan Minimal SMA.
- Jumlah OPD sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) dengan masing-masing 2 (dua) responden pada setiap OPD, Kecuali Badan Pengelola Keuangan Daerah ada sebanyak 10 (Sepuluh) dan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sebanyak 10 (Sepuluh) responden . sehingga total sampel sebanyak 84 orang.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variable independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = LPKD

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = SPIP

X2 = SIMDA

X3 = SAP

e = Error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Berganda

Pengujian kelayakan model dilakukan dengan melihat nilai F-hitung dan nilai koefisien determinasi (adjusted R^2). Hasil pengujian kelayakan model yang digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F juga untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit atau tidak (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai F-hitung disajikan pada Tabel 2. Dari Tabel 2 diketahui nilai F-hitung sebesar 90,746 dengan nilai probabilitas (P-value) sebesar 0,000. Karena nilai P-value $< 0,05$, berarti model regresi yang dilakukan adalah layak (fit). Hasil ini juga memberi arti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan.

Pada penelitian ini koefisien yang digunakan adalah adjusted R^2 untuk mengetahui kemampuan variabel pemanfaatan SIMDA, penerapan SAP dan sistem pengendalian intern. Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,778, yang berarti bahwa variasi peningkatan atau penurunan kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern, SIMDA dan penerapan SAP sebesar 77,8%. Sedangkan sisanya 22,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil pengujian bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t-hitung sebesar 5,251 dengan nilai probabilitas (P-value) sebesar 0,000. Karena nilai P-value $0,000 < \alpha 0,05$ maka disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang baik mendukung penciptaan laporan keuangan OPD yang berkualitas.

Hasil pengujian bahwa SIMDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t-hitung sebesar 4,095 dengan nilai probabilitas (P-value) sebesar 0,000. Karena nilai P-value $0,000 < \alpha 0,05$ maka disimpulkan bahwa Pemanfaatan SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan dan pemanfaatan SIMDA keuangan sangat membantu pengelola keuangan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, setiap pengelola keuangan harus mampu mengoperasikan SIMDA secara baik.

Hasil pengujian bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t-hitung sebesar 2,951 dengan nilai probabilitas (P-value) sebesar 0,004. Karena nilai P-value $0,004 < \alpha 0,05$ maka disimpulkan penerapan SAP yang efektif adalah yang akan mengarahkan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

Table 2. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig
SPIP	0,473	5,251	0,000
SIMDA	0,342	4,095	0,000
SAP	0,192	2,951	0,004
Adjusted R ²		0,507	
F-hitung		27,419	
Sig		0,000	

4.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini bermakna jika semakin meningkat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang dilakukan telah mampu mendorong pengelola keuangan daerah menciptakan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Secara keseluruhan, pada pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah di OPD Provinsi Bengkulu, pimpinan OPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan menjalankan perannya sebagai APIP secara memadai. Peran-peran tersebut adalah melaksanakan pengendalian, penilaian risiko dan pemantauan secara memadai, sehingga pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Pembinaan bawahan dilakukan secara terus-menerus dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan berfungsi dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atas pengelolaan keuangan guna menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Sejalan dengan teori stewardship yang dalam hal ini adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dengan semua dimensi yang ada di pemerintah daerah akan memberikan panduan dan dukungan dalam bentuk aturan dan administrasi pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai steward dapat terlaksana dengan baik, semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dalam menjalankan tugas tersebut, seorang steward yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, transparan dan akuntabel. Guna menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh steward sebagaimana dimandatkan oleh principal, agar berjalan dengan baik, maka diperlukan fungsi pengawasan dalam bentuk pengendalian intern.

SPIP dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien sehingga dapat tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dengan tujuan untuk mewujudkan good governance. Sedangkan ciri tercapainya good governance ditandai dengan tercapainya visi dan misi organisasi melalui kegiatan yang berjalan efektif dan efisien, kehandalan

dalam pelaporan keuangan, komitmen menyelenggarakan tugas Negara dan ketaatan serta kepatuhan pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pemanfaatan SIMDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari tiga variabel independen yang dianalisis, variabel pemanfaatan SIMDA menempati urutan terakhir dilihat dari besarnya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini bermakna jika sistem informasi (teknologi) yang dimanfaatkan oleh OPD dapat membantu dalam penciptaan laporan keuangan yang berkualitas. .

Penggunaan dan pemanfaatan SIMDA dalam hal ini adalah SIMDA keuangan membuat pengelola keuangan secara efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah, sehingga dapat menyampaikan laporan keuangan secara relevan, andal, tepat waktu dan efektif. Hal ini selaras dengan tujuan pengembangan SIMDA keuangan yakni mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik di tingkat pelaporan (SKPKD) ataupun di tingkat akuntansi (OPD). Aplikasi ini SIMDA keuangan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD lebih cepat dan efektif..

Pentingnya dukungan sistem informasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ini membuat pemerintah mengambil kebijakan dan mengharuskan tiap-tiap entitas pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan sistem informasi berupa software perangkat lunak Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Penggunaan aplikasi berbasis komputer ini sebagai wujud perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah dari sistem traditional budgeting ke arah modern budgeting. Selain itu, upaya ini dilakukan pemerintah untuk mendorong sektor publik memiliki manajemen kinerja (performance-based management) yang baik dan adanya reformasi manajemen publik (new public management).

Penerapan stewardship theory pada praktik pengelolaan keuangan adalah pemerintah sebagai steward yang diberi tugas oleh principal (rakyat) menjalankan pengelolaan keuangan negara secara memadai. Guna menjalankan hal tersebut pemerintah (steward) menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang memungkinkan memberikan kepercayaan (trust), khususnya kepada rakyat bahwa tugas-tugas pengelolaan sumber daya negara telah dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Software aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SIMDA keuangan. Penggunaan aplikasi SIMDA keuangan ini karena merespon perkembangan yang terjadi pada sistem informasi guna mengikuti perubahan-perubahan dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan. Kualitas informasi keuangan merupakan hasil dari suatu sistem informasi yang berkualitas.

4.4. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini bermakna jika semakin baik penerapan SAP oleh pengelola keuangan, maka laporan keuangan daerah juga akan semakin berkualitas. Penerapan SAP yang baik tersebut memungkinkan pegawai pengelola keuangan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

Dalam upaya menciptakan laporan keuangan daerah yang berkualitas tersebut, telah dimandatkan untuk mengetahui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan aturan atau standar penerapan akuntansi dan pelaporan yang harus dilakukan oleh steward (pemerintah) sebagaimana mandat dari principal (rakyat). SAP merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Purdy (1993: 47) menegaskan bahwa sebelum seseorang menggunakan data yang diperoleh, orang tersebut perlu memahami fungsi data tersebut, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

SAP merupakan standar resmi yang digunakan oleh pengelola keuangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. SAP memberi petunjuk bagi pengelola keuangan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan jenis laporan, bukti laporan dan menyajikan informasi lainnya sebagai pendukung laporan. Oleh karena itu, bagi setiap pengelola keuangan, menguasai dan memahami SAP dengan benar dapat membantu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Pegawai pengelola keuangan di Propinsi Bengkulu telah dapat menatausahakan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Penatausahaan keuangan daerah tersebut meliputi pencatatan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan sistem pencatatan akuntansi lainnya sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya. Pemahaman mengenai SAP yang baik menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan, pengelola keuangan dapat melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, saran yang sebaiknya dilakukan oleh OPD adalah meningkatkan pemahaman mengenai SAP pengelola keuangan melalui program pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi manajemen daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.
- Sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.
- Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

Daftar Pustaka

- Bastian, I., 2010. Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrosi. Insan Cendikia, Surabaya
- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Pusat Pengembangan Akuntansi. FE Universitas Gadjah Mada.
- Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit. Erlangga :Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
- BPK-RI. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor : 06.A/LHP/XVIII.BKL/05/2016, 27 mei 2016.
- _____. 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor: 21.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017, 30 mei 2017.
- Ghozali, I., 2011. Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- I Wayan G dan Dodik A, 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (Vol. 13 No 1 Tahun 2015)..
- Jonas, GJ dan G.J. dan J. Blanchet. 2000. Assessing Quality of Financial Reporting. Accounting Horizons. Vol. 14. No. 3 (September). 353-363.
- Jones, G.J &Blanchet, J., 2000. Assessing Quality of Financial Reporting.Accounting Horizons, Vol 14. No.3 Hal 353-363
- Jusmin, A., 2013. Metode Penelitian Survey, Andi Offset, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jogjakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Jogjakarta: Andi.
- _____, 2007. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.,
- _____, 2009. Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- _____, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sara Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006.
- Margono, 2010. Modul Akuntansi Keuangan Daerah, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
- Nordiawan. D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Stem Aplikasi Terintegrasi, Jakarta
- Purdy, A., 1993. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi
- Purwanto, Wahyu. (2015). Kajian Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. UGM: Tesis.
- Rajana HRP, Junita P. 2009. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematang Siantar. Tesis USU. Medan.
- Republik Indonesia, 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- _____, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- _____, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- _____, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
- Sekaran, U., 2007. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4, Buku 1, Salemba Empat. Jakarta
- Suprayogi, 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Kompleksitas Tugas, Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit. REFORMASI, Vol. 1 No. 5, Hal. 120-135
- Yuliani, S., Nadirsyah & Bakar, U., 2010. Pengaruh Pemahaman standar akuntansi, Pemanfaatan SIMDA Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh), Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Hal. 23-39
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.01. Hal: 21-37.